



LAPORAN KEGIATAN 2020

**KERJASAMA PEMBUATAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEMISKINAN (SIK) YANG TERINTEGRASI
DENGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID)
SERTA LABORATORIUM PENGEMBANGAN METODOLOGI
PENDATAAN WARGA MISKIN SECARA PARTISIPATIF
DI KABUPATEN WONOGIRI**

LAPORAN KEGIATAN :

**KERJASAMA PEMBUATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEMISKINAN (SIK) YANG
TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) SERTA LABORATORIUM
PENGEMBANGAN METODOLOGI PENDATAAN WARGA MISKIN SECARA
PARTISIPATIF DI KABUPATEN SUKOHARJO**

OLEH :

YAYASAN JALATERA KOTA SURAKARTA

I. PENDAHULUAN

Yayasan JALATERA yang di dukung Ford Foundation dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk pembuatan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa (SID) serta membuat laboratorium pengembangan metodologi pendataan warga miskin secara partisipatif.

Adapun ruang lingkup kerjasama antara Yayasan JALATERA Kota Surakarta dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan metodologi pendatan berbasis keluarga miskin secara partisipatif untuk mengurangi tingkat kesalahan pendataan yang dilakukan Nasional dan melakukan kategorisasi kesejahteraan di 5 desa.
2. Melakukan Pilot project di 5 (lima) desa dalam 1 (satu) kecamatan untuk pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID). Salah satu fiturnya adalah mengintegrasikan SID dengan SIK Kabupaten, sehingga data bisa dilakukan up dating di tingkat desa berbasis web.
3. Pengembangan teknologi android untuk proses verifikasi indicator kemiskinan yang terintegrasi dengan Sistem informasi kemiskinan (SIK) dan Sistem Informasi Desa (SID).
4. Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Kemiskinan (SIK) di tingkat Kabupaten berbasis web, yang akan mempermudah setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperoleh informasi kebutuhan warga miskin baik untuk layanan jaminan sosial maupun layanan program. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas rapat-rapat yang dijalankan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Adapun yang melatarbelakangi kerjasama ini adalah hasil temuan pada waktu kerjasama Yayasan JALATERA dengan pemerintah Kota Surakarta, dimana beberapa persoalan data kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan yang belum efektif dan belum banyak pihak melakukan kerja-kerja bersama sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini berdampak pada lambatnya penurunan kemiskinan dan di tingkat masyarakat terjadi kecemburuan sosial. Adapun temuan yang di peroleh pada saat kerjasama dengan pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- Masih banyak data warga yang lebih miskin justru tidak masuk dalam data nasional.
- Tidak tepat sasaran Program karena kurang akurasinya data.

- Tidak tepat program Karena lemahnya informasi kebutuhan masyarakat miskin.
- Tidak terdistribusinya data kemiskinan pada setiap stake holder pembangunan Kabupaten, sehingga masing-masing bekerja dengan data yang dimiliki masing-masing (Belum single data).

II. HASIL KEGIATAN

Adapun hasil kegiatan yang sudah dijalankan antara Yayasan JALATERA dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, hasil kegiatannya beserta kesimpulan dan rekomendasi untuk pemerintah kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Hasil 1 :

**Efektifitas Metodologi Participatory Poverty
Assesement (PPA) berbasis keluarga untuk
menghasilkan data warga miskin yang lebih valid
sesuai dengan kondisi masyarakat.**

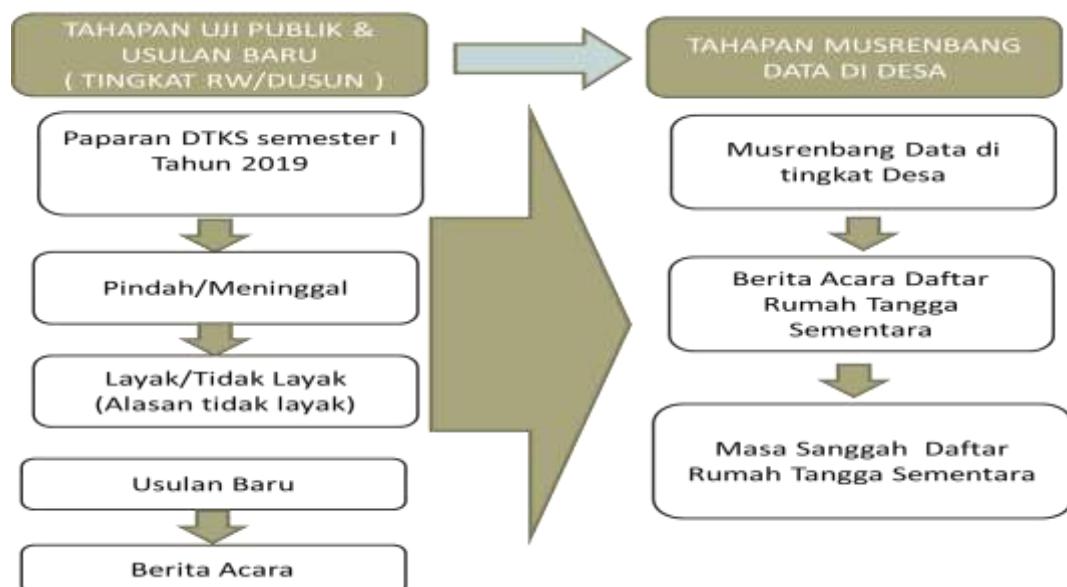
A. Implementasi Metodologi Participatory Poverty Assessment (PPA) Berbasis Keluarga

Implementasi Metodologi Participatory Poverty Assessment (PPA) berbasis keluarga dilaksanakan di 3 desa dan 2 Kalurahan di Kecamatan Tawang Sari. PPA dilaksanakan secara berjenjang mulai uji publik di tingkat Rukun warga (RW) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) data di tingkat desa, mampu menghasilkan data yang presisi dengan kondisi riil masyarakat. Metodologi ini juga diuji berdasarkan peserta uji publik di tingkat RW dengan peserta kelompok Perempuan, Kelompok Laki-laki dan kelompok gabungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini untuk menguji tingkat keakuratan data di masing-masing kelompok, hasil temuan akan menjadi bahan rekomendasi untuk menentukan jenis kelamin peserta uji publik ke depannya.

Adapun laboratorium untuk Pengembangan metodologi pendataan warga miskin dilaksanakan di 5 desa di kecamatan Tawang Sari yaitu :

- a. Desa Ponowaren, dengan jumlah warga miskin sebesar 860 Rumah Tangga sasaran (RTS)
- b. Desa Tambakboyo, dengan jumlah warga miskin sebesar 825 Rumah Tangga sasaran (RTS)
- c. Desa Grajegan, dengan jumlah warga miskin sebesar 449 Rumah Tangga sasaran (RTS)
- d. Kelurahan Pojok, dengan jumlah warga miskin sebesar 736 Rumah Tangga sasaran (RTS)
- e. Kelurahan Dalangan, dengan jumlah warga miskin sebesar 665 Rumah Tangga sasaran (RTS)

Total Data yang dilakukan proses pengujian tingkat validitas data sebanyak 3535 Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Semester I Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun tahapan kegiatan yang dijalankan sebagai berikut :



Beberapa kesimpulan yang diperoleh dalam melakukan proses uji publik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Semester I tahun 2019 baik dari sisi efektifitas penilaian warga miskin, menjangring warga miskin baru, peserta uji publik maupun basis wilayah yang digunakan. Adapun temuan-temuan pelaksanaan uji coba metodologi PPA berbasis keluarga yang dijalankan di 5 desa adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas metodologi Participatory Poverty Assesment (PPA) berbasis keluarga untuk menyaring layak tidaknya warga miskin, Meninggal sebatangkara, dan pindah

Tabel 1 :
Rekapitulasi Hasil Uji Publik Berjenjang
Data Tingkat Kesejahteraan Sosial (DTKS) Semester I Tahun 2019
Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo

Uraian	Ponowaren	Tambakboyo	Grajegan	Pojok	Dalangan	Jumlah	Prosentase
Jumlah Data PBDT	860	825	449	736	665	3535	
Koreksi Tidak Layak Uji Publik RW	54	31	71	21	100	277	
Prosentase	6,28	3,76	15,81	2,85	15,04		7,84 %
Koreksi Pindah, Meninggal dll	61	67	36	68	70	302	
Prosentase	7,09	8,12	8,02	9,24	10,53		8,54 %
Koreksi Tidak Layak Musren Data	1	0	11	49	0	61	
Prosentase	0,12	0,00	2,45	6,66	0,00		1,73 %
Jumlah Koreksi Masyarakat	116	98	118	138	170	640	
Prosentase Koreksi Masyarakat	13,49	11,88	26,28	18,75	25,56		18,10 %
Koreksi Tidak Layak Versi Faslak	9	3	0	0	0	12	
Prosentase	1,05	0,36	0,00	0,00	0,00		0,34 %
Jumlah Koreksi Faslak	9	3	0	0	0	12	
Prosentase Koreksi Faslak	1,05	0,36	0	0,00	0,00		0,34 %
TOTAL KOREKSI	125	101	118	138	170	652	
PROSENTASE KOREKSI	14,53	12,24	26,28	18,75	25,56		18,44 %
SISA DATA PBDT	735	724	331	598	495	2883	

- a. Proses PPA berbasis keluarga dilakukan melalui uji publik berjenjang dimulai dari Rukun Warga (RW) dengan mengundang perwakilan warga miskin dan perwakilan masyarakat yang tidak miskin untuk menentukan layak tidaknya seseorang disebut miskin berdasarkan pengamatan harian mereka bagaimana keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. **Dari Total Data 5 desa, ditemukan 277 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dinyatakan tidak layak Miskin atau sebesar 7,84 %.**
- b. Hasil uji publik di tingkat RW juga menemukan data warga miskin yang seharusnya sudah dikeluarkan dari DTKS karena **meninggal sebatang kara (Tidak ada Keturunan), pindah dan tidak ditemukan sebesar 302 Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau sebesar 8,54 % dari total data yang ada.**
- c. Data warga miskin yang dinilai layak dalam proses uji publik di tingkat RW, secara berjenjang dibawa ke tingkat desa untuk dilakukan MUSRENBANG Data. Data sisa DTKS dilakukan penilaian layak tidaknya oleh peserta, dimana setiap utusan RW boleh melakukan koreksi RW yang lainnya. Adapun hasil musrenbang data, masih ada data yang dikoreksi yaitu sebanyak **61 RTS atau sebesar 1,73 % dari total data. Sehingga Total Koreksi Masyarakat secara berjenjang mampu menghasilkan ketidak validtan DTKS semester I tahun 2019 sebesar 604 RTS atau sebesar 18,10 %.**
- d. Dari proses hasil kelayakan di tingkat musrenbang data, Tim masih mencoba menyaring lagi menurut pemahaman fasilitator lokal yang direkrut oleh yayasan JALATERA untuk melakukan penilaian ulang atas hasil data Musrenbang. Pertimbangan ini hanya untuk melakukan cross chek apakah hasil PPA benar-benar bisa 100 % Valid dihasilkan di tingkat masyarakat atau masih ada koreksi atas kelayakan miskin tidaknya. **Adapun hasil koreksi versi fasilitator lokal (faslok) masih ditemukan sebanyak 12 RTS atau sebesar 0,24 %.** Data koreksi faslok didominasi dari desa Ponowaren dan tambakboyo jumlahnya tidak signifikan. Adapun 3 desa lainnya yaitu Grajegan, Pojok dan Dalangan hasil uji publik masyarakat relatif tidak ada koreksi.
- e. **KESIMPULAN 1 :**
- Metodologi Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) berbasis keluarga yang dilakukan secara berjenjang Efektif mampu menyaring data berdasarkan kategorisasi kesejahteraan berdasarkan Pengamatan Masyarakat di Tingkat RW.
 - Musrenbang Data di Tingkat Desa mampu menyaring ulang atas kelayakan dari hasil uji public RW.

2. Efektifitas metodologi Participatory Poverty Assesment (PPA) berbasis keluarga Dilihat dari validitas usulan baru warga miskin yang belum terdata di DTKS.

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Uji Publik Berjenjang
Data Usulan Baru Warga Miskin Yang Belum Tercantum Dalam DTKS Semester 1 2019
Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo

Uraian	Ponowaren	Tambakboyo	Grajan	Pojok	Dalangan	Jumlah	Prosentase
Jumlah Data PBDT	860	825	449	736	665	3535	
Jumlah Usulan Baru Uji Publik RW	337	256	150	176	278	1197	
Prosentase	39,19	31,03	33,41	23,91	41,80		33,86 %
Jumlah Usulan Baru Musrenbang	15	24	0	21	7	67	
Prosentase	1,74	2,91	0,00	2,85	1,05		1,90 %
Jumlah Usulan Baru	352	280	150	197	285	1264	
Prosentase Usulan Baru	40,93	33,94	33,41	26,77	42,86		35,76 %
Koreksi Tidak Layak Musrenbang	3	0	0	21	0	24	
Prosentase	0,85	0,00	0,00	10,66	0,00		0,68 %
Koreksi Tidak Layak Versi Faslok	0	9	0	0	56	65	
Prosentase	0,00	3,21	0,00	0,00	19,65		1,84 %
Jumlah Koreksi	3	9	0	21	56	89,00	
Prosentase Koreksi	0,85	3,21	0,00	10,66	19,65		2,52 %
Usulan Baru Layak	349	271	150	176	229	1175	235,00
Prosentase usulan Baru Layak	40,58	32,85	33,41	23,91	34,44		33,24 %

- a. Proses PPA dilakukan melalui uji publik berjenjang dimulai dari Rukun Warga (RW) dengan mengundang perwakilan warga miskin dan perwakilan masyarakat yang tidak miskin untuk menentukan warga miskin baru berdasarkan pengamatan harian mereka bagaimana keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. **Dari Total Data 5 desa, ditemukan 1175 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dinyatakan Miskin tapi belum masuk dalam DTKS atau sebesar 33,24 %.**
- b. Data usulan warga miskin baru dan belum masuk DTKS di tingkat RW, secara berjenjang dibawa ke tingkat desa untuk dilakukan MUSRENBANG Data. Di dalam musrenbang menentukan 2 hal yaitu :
- Usulan Baru diluar usulan RW
- Jumlah usulan baru yang belum terdata di RW dan diusulkan di tingkat desa sebesar 67 RTS atau sebesar 1,90 %.

- Data Usulan warga miskin Baru Yang tidak layak miskin
Dari jumlah usulan warga miskin Baru yang terkoreksi tidak layak miskin sebanyak 24 RTS atau sebesar 0,68 %
- c. Jadi Total usulan warga miskin baru versi masyarakat sebanyak sebanyak 1264 RTS atau sebesar 35,76 %.
- d. Dari proses hasil kelayakan di tingkat musrenbang data, Tim masih mencoba menyaring lagi menurut pemahaman fasilitator lokal yang direkrut oleh yayasan JALATERA untuk melakukan penilaian ulang atas hasil data Musrenbang. Pertimbangan ini hanya untuk melakukan cross chek apakah hasil PPA benar-benar bisa 100 % Valid dihasilkan di tingkat masyarakat atau masih ada koreksi atas kelayakan miskin tidaknya. **Adapun hasil koreksi versi fasilitator lokal (faslok) masih ditemukan sebanyak 89 RTS atau sebesar 2,52 %.** Data koreksi faslok didominasi dari desa dalangan dan Pojok yang cukup signifikan koreksi tidak layaknya, adapun desa ponowaren dan tambakboyo koreksi tidak layaknya sedikit dan desa Grajegan tidak ada koreksi.
- e. **KESIMPULAN 2 :**
 - Metodologi Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) berbasis keluarga yang dilakukan secara berjenjang Efektif mampu menemukan warga miskin baru yang belum terdata di DTKS berdasarkan kategorisasi kesejahteraan berdasarkan Pengamatan Masyarakat di Tingkat RW. Tingkat kekerabatan yang kuat antara masyarakat, setiap peserta mampu melihat penghidupan keseharian sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhannya dan mengetahui asset-asset penghidupan dari sebuah keluarga.
 - Musrenbang Data di Tingkat Desa mampu menghasilkan tambahan usulan baru, tetapi hasil evaluasi dengan fasilitator lokal “sebaiknya di musrenbang data tingkat desa tidak membuka usulan baru”, hal ini menyangkut pertimbangan netralitas utusan yang ditunjuk.

Tabel 3
Total Data Akhir
Hasil Uji Publik Berjenjang
Sisa DTKS + Data Usulan Baru Warga Miskin
Yang Belum Tercantum Dalam DTKS Semester 1 2019
Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo

Uraian	Ponowaren	Tambakboyo	Grajegan	Pojok	Dalangan	Jumlah	Prosentase
Jumlah Data PBDT	860	825	449	736	665	3535	100 %
Jumlah Koreksi Tidak Layak + meninggal, pindah dll	125	101	118	138	170	652	
Prosentase	14,53	12,24	26,28	18,75	25,56	18,44	%
Jumlah Usulan Baru Warga Miskin	349	271	183	176	229	1208	34,17
Total Sisa Data DTKS + Usulan Baru	1084	995	514	774	724	4091	115,73 %
Kenaikan Data	224	170	65	38	59	556	
Prosentase Usulan Baru	26,05	20,61	14,48	5,16	8,87		15,73 %

Positioning data calon warga miskin dilihat dari jumlah data DTKS yang terkoreksi (tidak layak, Meninggal sebatangkara, tidak ditemukan, pindah) dan disandingkan dengan jumlah usulan baru, terjadi kenaikan sebesar 556 RTS atau 15,73 %. Hal ini bisa dilihat tabel diatas.

3. Efektifitas Metodologi Participatory Poverty Assesment (PPA) berbasis keluarga Dilihat dari jenis kelamin kepersetaan uji publik di tingkat RW/Dusun.

Tabel 3
DATA DTKS YANG TERKOREKSI
Berdasarkan Metode Jenis Kelamin Peserta AKP

No	Metode Peserta	Total Data yang dikoreksi	Koreksi Tidak Layak Uji Publik RW	%	Koreksi Pindah, Meninggal dll	%	Koreksi Tidak Layak Musren Data	%	Koreksi Tidak Layak Versi Faslok	%	Total Koreksi	Total %
1	Laki-Laki	1475	102	6,92	124	8,41	33	2,24	11	0,75	270	18,31
2	Laki-Laki + Perempuan	1323	123	9,30	105	7,94	14	1,06	1	0,08	243	18,37
3	Perempuan	737	52	7,06	73	9,91	14	1,90	0	0,00	139	18,86

Kesimpulan 3 :

- Hasil uji publik berdasarkan jenis kelamin peserta antara laki-laki, campuran maupun kelompok perempuan hasilnya relatif sama dan hasil paling tinggi adalah kelompok perempuan sebesar 18,86 %. Tetapi dilihat dari koreksi faslok hasil dari peserta laki-laki koreksi data yang tidak layak, paling tinggi dari kelompok laki-laki sebanyak 11 orang dan dari kelompok campuran sebanyak 1 orang, sedangkan kelompok perempuan menurut faslok tidak ada koreksi.

REKOMENDASI

PENGUNAAN METODOLOGI PARTICIPATORY POVERTY ASSESEMENT (PPA) BERBASIS KELUARGA UNTUK MENDAPATKAN DATA WARGA MISKIN YANG VALID

1. Metodologi PPA berbasis keluarga cukup efektif dalam melakukan koreksi kelayakan sebuah Rumah Tangga sasaran (RTS) untuk dikatakan “Miskin” baik yang sudah terdata di DTKS maupun usulan baru yang belum masuk dalam DTKS. Metodologi ini patut dikembangkan Dinas Sosial (DINSOS) Pemerintah Kabupaten dan direplikasikan ke desa-desa yang lain.
2. Prosentase data yang meninggal sebatang kara, tidak ditemukan, pindah dan tidak domisili hasilnya mencapai 302 KK atau sebesar 8,54 % dari jumlah data yang diuji. Dibutuhkan integrasi dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas kependudukan catatan sipil (Dispendukcapil) agar data-data tersebut bisa segera dikeluarkan dari data DTKS.
3. Metodologi PPA, direkomendasikan memakai peserta dari kelompok perempuan. Apabila ada forum PKK tingkat RW, sebaiknya menumpang acara dipertemuan tersebut untuk penghematan biaya dari sisi konsumsi peserta.
4. Hasil evaluasi dengan fasilitator lokal, merekomendasikan metodologi ini perlu ada penambahan teknik perangkingan antar warga miskin sesuai dengan pandangan setiap hari pola kehidupannya atau sebagai dasar menentukan tingkat kesejahteraan warga.
5. Semua hasil baik dari koreksi DTKS maupun usulan baru, sebaiknya masih disebut dengan calon warga miskin. Penilaian akan dilakukan dengan cara penyortiran ulang oleh Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten dengan teknik : Menambahkan rumus kategorisasi kesejahteraan di dalam aplikasi yang akan dikembangkan <https://sijawara.sukoharjokab.go.id> sebelum data dikirim ke Nasional.
6. Apabila pemerintah Kabupaten akan melaksanakan replikasi metodologi ini ke desa-desa yang lain, bisa menggunakan fasilitator lokal yang sudah dilatih dan sudah melakukan tahapan kegiatan uji publik. Adapun jumlah fasilitator yang dilatih sebanyak 25 orang atau setiap desa tersedia 5 orang fasilitator.

Hasil 2 :

**Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi
Kesejahteraan (SIK) di tingkat Kabupaten**

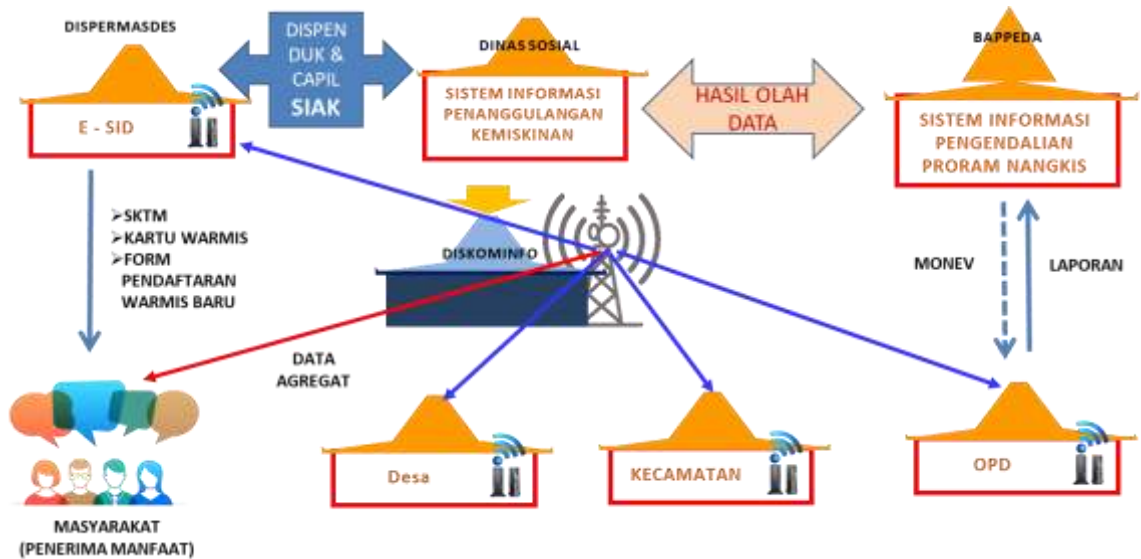
B. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa (SID)

Tidak terdistribusinya data kemiskinan ke seluruh stake holder pembangunan di Kabupaten baik itu pemerintah desa maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di dalamnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), berdampak pada lambatnya penurunan angka kemiskinan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Lemahnya pengelolaan tata kelola data dan system informasi kemiskinan, berdampak pada kesalahan dalam mendiagnose kemiskinan. Hal ini mengakibatkan lemahnya perencanaan dan implementasi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh setiap stake holder pembangunan khususnya TKPKD dalam menentukan sasaran maupun menentukan jenis layanan program. Di sisi lain kebijakan implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa atas penggunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum optimal penggunaannya dari sisi pro poor, pro growth dan pro job, hal ini ditandai dengan pembangunan desa masih terkonsentrasi pada pembangunan fisik. Problem mendasarnya adalah tidak tersedianya data kemiskinan di desa.

Ketersediaan data yang mudah diakses, akan mempermudah setiap OPD dan desa dalam menyusun arah kebijakan program yang akan dirancang tiap tahunnya untuk menentukan jenis layanan dan sasaran program. Selain itu, persolan perbedaan data tidak akan terjadi baik antara desa, kecamatan dan di tingkat Kabupaten karena data akan selalu sama. Dengan pola ini, kabupaten bisa menerapkan single data kesejahteraan untuk perencanaan pembangunan bagi setiap stake holder pembangunan.

Rancang bangun Aplikasi Sistem informasi Kesejahteraan (SIK) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa (SID) dibutuhkan team work di level Kabupaten dalam penyiapan tata kelola data kemiskinan yang direncanakan. Adapun tim forum data meliputi : bapelbangda, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes). Adapun alamat aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan adalah : <https://sijawara.sukoharjokab.go.id/>

1. Model distribusi Data



Aplikasi saat ini sudah bisa digunakan oleh stake holder pembangunan, adapun data yang sudah terpasang adalah data Pembaharuan Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Semester I tahun 2019.

Secara aplikasi SIK sudah terkoneksi dengan data Sistem Administrasi Kependudukan (SIK), sehingga perubahan-perubahan terkait dengan data kependudukan sudah bisa langsung mengambil dari dispendukcapil.

Adapun kesimpulan dari rancang bangun SIK adalah sebagai berikut :

- SIK mampu berintegrasi dengan Web service SIAK dengan baik.
- SIK sudah bisa diakses oleh OPD, Kecamatan maupun Desa. Dibutuhkan pengaturan hak akses oleh diskominfo.
- Di tingkat desa, SIK masih berdiri sendiri dan berfungsi sebagai Sistem Informasi Desa (SID). Hal ini karena belum berfungsinya SID yang dikembangkan oleh Dinas KOMINFO yaitu PIDEKSO yang direncanakan fitur SIK akan menjadi menu tambahan SID yang direncanakan.
- Data di dalam aplikasi sudah bisa di dorong ke OPD oleh Baperlitbang ataupun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai baseline Perencanaan pembangunan

tahunan. Meskipun dari hasil uji coba 5 desa yang sudah dijalankan, Data DTKS masih belum valid dengan Kondisi Lapangan. Dibutuhkan pelatihan bagi OPD, Desa dan Kecamatan dalam penggunaan aplikasi.

2. **Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan (<https://sijawara.sukoharjokab.go.id>)**

Aplikasi berbasis web selain untuk mempermudah distribusi data kesejahteraan kepada setiap stake holder pembangunan sebagai dasar menyusun perencanaan pembangunan, khususnya dalam menentukan kelompok sasaran dan jenis layanan. Diharapkan aplikasi juga mampu melakukan pengukuran dampak program, monitoring capaian kegiatan dan perkembangan tingkat kesejahteraan setiap individu warga miskin. Rancangan dalam membuat fitur-fitur di dalam aplikasi, harus mampu mempermudah setiap Stake holder pembangunan dalam membaca data dan menganalisa Data.

Adapun tampilan dashboard depan <https://sijawara.sukoharjokab.go.id> adalah sebagai berikut :

The screenshot shows the dashboard for Sijawara Sukoharjo. At the top, there is a navigation bar with the logo of BAPPELBANGDA SUKOHARJO and links for BERANDA, PBDD, KABAR BERITA, and HUBUNGI KAMI. Below the navigation bar, the main header reads 'SIJAWARA SUKOHARJO' and 'BERANDA'. The main content area is titled 'SUKOHARJO MAKMUR' with the tagline 'Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, Rapi'. Below this, there are four large statistics cards: '97,784 RUMAH TANGGA SASARAN', '332,537 ANGGOTA RUMAH TANGGA', '12 KECAMATAN', and '167 DESA DAN KELUBAHAN'. The bottom section is titled 'WILAYAH ADMINISTRASI' and lists administrative regions and their respective villages.

Kec. BAKI	Kec. BENDOSARI	Kec. BULU	Kec. GATAK
Desa NGROMBO	Desa JAGAN	Desa SANGGANG	Desa SANGGUNG
Desa MANCASAN	Desa MANISHARJO	Desa KAMAL	Desa KAGOKAN
Desa GEDONGAN	Desa CABEYAN	Desa GENTAN	Desa BLUMBING
Desa JETIS	Desa PUHGOGOR	Desa KEDUNSONO	Desa KRAJAN
Desa BENTAKAN	Desa PALLIHOMBO	Desa TIYARAN	Desa GENENG
Desa KUDU	Desa BENDOSARI	Desa BULU	Desa JATI
Desa KADILANGU	Desa MOJOREJO	Desa KUNDEN	Desa TROSEMI
Desa BAKIPANDEYAN	Desa MERTAN	Desa PURON	Desa LUWANG
Desa MENURAN	Desa MULUR	Desa MALANGAN	Desa KLASAMAN
Desa DUWET	Desa TORIYO	Desa LENGKING	Desa TEMPEL
Desa SIWAL	Desa JOMBOR	Desa NGASINAN	Desa SRATEN
Desa WARU	Desa SIDOREJO	Desa KARANGASEM	Desa WIRNANGGAN
Desa GENTAN	Desa SUGIHAN		Desa TRANGSAN
Desa PURBAYAN	Desa GENTAN		Desa MAYANG
Kec. GROGOL	Kec. KARTASURA	Kec. MOJOLABAN	Kec. NGUTER

Detail masing-masing fitur dari dashboard yang dikembangkan, memiliki fungsi diantaranya adalah :

a. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan



1. Wilayah Administratif

Fitur wilayah administratif berisi tentang wilayah-wilayah Sukoharjo mulai dari kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun, RW, RT yang berisi jumlah warga miskin di masing-masing level baik itu desil 1,2,3,4,5.

2. Data Indikator Rumah Tangga

Fitur ini berisi indikator-indikator kemiskinan berdasarkan kebutuhan rumah tangga sasaran (RTS), data ditampilkan jumlah setiap indikator per periode waktu pendataan.

3. Data Indikator Individu

Fitur ini berisi indikator-indikator kemiskinan berdasarkan kebutuhan Anggota Rumah Tangga (ART), data ditampilkan jumlah setiap indikator per periode waktu pendataan.

4. Query Data RTS

Fitur ini dipakai untuk menganalisa gabungan indikator dari indikator Rumah Tangga sasaran, dimana terkadang untuk menentukan sasaran penerima manfaat dibutuhkan indikator tambahan. Dengan model ini, setiap calon penerima manfaat yang memenuhi syarat akan disaring oleh aplikasi.

5. Query Data ART

Fitur ini dipakai untuk menganalisa gabungan indikator dari indikator Anggota Rumah Tangga (ART), dimana terkadang untuk menentukan sasaran penerima manfaat dibutuhkan indikator tambahan. Dengan model ini, setiap calon penerima manfaat yang memenuhi syarat akan disaring oleh aplikasi.

b. Fitur Kantong-kantong Kemiskinan (Wilayah Administrasi)

Fitur ini akan mempermudah pengambil kebijakan untuk menentukan wilayah-wilayah yang akan menjadi sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan, dimana kantong kemiskinan harusnya menjadi prioritas utama menjadi lokasi intervensi. Dalam fitur ini data dibagi ke dalam Wilayah secara berjenjang mulai dari Kecamatan, Desa, Dusun, RW, RT dan di setiap jenjang bisa langsung dibuka by name by address baik RTS miskin maupun Individu anggota Rumah Tangga (ART) dari RTS serta dibagi berdasarkan tingkat keparahan kemiskinan (Desil 1, 2, 3, 4 dan 5).

Adapun tampilan Fitur kantong kemiskinan adalah sebagai berikut :

The screenshot displays a multi-level data hierarchy for poverty analysis. At the top, a table for Kecamatan (Kecamatan) shows data for Desil 1 through Desil 5 and a TOTAL column. Below this, a table for Desa (Desa) provides a breakdown of data for each village, including a list of Dusun (Dusun) for each. A detailed view of a Dusun shows individual household data with columns for ID, Name, NIK, and NK Number.

Data Periode PDBT 2019 Smt I													
#	Wilayah	Desil1	Desil2	Desil3	Desil4	Desil5	TOTAL						
		#	#	#	#	#	#	#					
1	Kecamatan (Kecamatan)	1,131	4,301	2,249	4,178	1,101	4,307	1,246	1,214	1,081	1,179	8,862	18,231
2	Kecamatan (Kecamatan)	1,889	5,549	3,529	4,381	1,811	3,404	877	2,449	1,199	1,107	7,220	18,178
3	Kecamatan (Kecamatan)	1,104	1,167										
4	Kecamatan (Kecamatan)	1,129	1,881										
5	Kecamatan (Kecamatan)	1,080	1,894										
6	Kecamatan (Kecamatan)	822	2,908										
7	Kecamatan (Kecamatan)	1,038	1,574										
8	Kecamatan (Kecamatan)	1,000	1,141										
9	Kecamatan (Kecamatan)	1,411	1,948										

Data Periode PDBT 2019 Smt I											
#	Wilayah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 5	TOTAL				
		#	#	#	#	#	#	#			
1	Desa (Desa)	178	368	211	817	119	428	228	447	774	2,885
2	Desa (Desa)	261									
3	Desa (Desa)	31									
4	Desa (Desa)	158									
5	Desa (Desa)	125									
6	Desa (Desa)	218									
7	Desa (Desa)	100									
8	Desa (Desa)	14									

Data Periode PDBT 2019 Smt I											
#	Wilayah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 5	TOTAL				
		#	#	#	#	#	#	#			
1	Desa (Desa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Desa (Desa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Desa (Desa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Desa (Desa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Desa (Desa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Desa (Desa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Desa (Desa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Desa (Desa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Desa (Desa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Desa (Desa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

#	ID DDT	ID ART DDT	Nama	NIK	NK Nomor
1	3312000000001179	33120000000017901	RIJAH	3312071294000094	3312071903980012
2	3312000000001179	33120000000017902	RIJAH	3312075201000001	3312071903980012
3	3312000000001179	33120000000017903	RIYAH TRIASTUTI	3312070401000001	3312071903980012
4	3312000000001180	33120000000018001	MARDIANI	3312070411070001	3312070700011020
5	3312000000001180	33120000000018002	RIYAH	3312070410710001	3312070700011020
6	3312000000001180	33120000000018003	AMARO LILDAD	3312070003000002	3312070700011020
7	3312000000001180	33120000000018004	MALIED HIRIPWATI	3312070001100002	3312070700011020
8	3312000000001180	33120000000018005	RAFI SANGSAP	3312070001100001	3312070700011020
9	3312000000001111	331200000000111101	WARTO	3312071111000001	3312070700011037
10	3312000000001111	331200000000111102	NYI LESTARI	3312070001100001	3312070700011037

c. Fitur Kebutuhan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Fitur ini menampilkan indikator dan sub indikator masalah yang terjadi di setiap rumah tangga miskin setiap periode pendataan. Fitur ini dibuat agar memudahkan setiap Organisasi Perangkat daerah bisa terlibat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan tupoksi tiap OPD. Dari berbagai macam indikator dan sub indikator di dalam aplikasi, bila kita kaitkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD maka setiap dinas akan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan indikator kemiskinan tersebut. Data agregat yang ditampilkan setiap semester, bisa menjadi alat monitoring dan evaluasi setiap OPD dalam memberikan kontribusi untuk penyelesaian kemiskinan berdasarkan indikator dinas.

Selain agrerat masalah yang ditampilkan, data juga menampilkan by name by address. Sehingga dengan fitur ini akan mempercepat OPD dalam menentukan kelompok sasaran berdasarkan IKU OPD.

#	Indikator / Opsi	Data		
		PBDT 2019 Smt II	PBDT 2019 Smt I	PBDT 2018 Smt I
5 STATUS TEMPAT TINGGAL				
0	Tidak Terdata	0	204	1,947
1	Milik Sendiri	0	97,368	98,670
2	Kotrak/sewa	0	209	186
3	Bebas sewa	0	2,396	3,362
4	Dinas	0	15	2
5	Lainnya	0	1,138	615
6 STATUS LAHAN TPT TINGGAL				
1	Milik sendiri	0	92,132	92,445
2	Milik orang lain	0	6,946	5,428
3	Tanah negara	0	717	312
4	Lainnya			

Data RTS Berbasis Indikator: STATUS LAHAN TPT TINGGAL = Tanah negara

#	ID BDT	Nama Kepala RTS	Alamat	Skor
1	331201000800000	MURATNO	DUMPEL RT 004 RW 04	29
2	3312010007000377	LASNO	DUSUN GLAGAH CIMBO RT 001 RW 05	63
3	3312010008000720	JURU HARTONO	DUSUN DELIK RT 002 RW 11	48
4	3312010008000534	SABIMAN SARTOMO	DUSUN DELIK RT 03 RW 12	26
5	3312010008000379	GUHARJI	DUSUN BLEDAS RT 002 RW 05	17
6	3312010008000326	TUMPO	DUSUN GOGANG RT 002 RW 01	23
7	3312010008000020	SABININ MULYO HARTONO	DUSUN GOGANG RT 003 RW 01	17
8	3312010008000113	SAUTI	DUSUN GOGANG RT 002 RW 01	33
9	3312010008000054	MULJAH	DUSUN GOGANG RT 004 RW 02	23
10	3312010008000088	VAEN KARTOMO	DUSUN GOGANG RT 004 RW 02	24

d. Fitur Kebutuhan Anggota Rumah Tangga (ART)

Fitur ini menampilkan indikator dan sub indikator masalah yang terjadi di setiap Anggota Rumah Tangga (ART) dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) miskin setiap periode pendataan. Fitur ini dibuat agar memudahkan setiap Organisasi Perangkat daerah bisa terlibat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan tupoksi tiap OPD. Dari berbagai macam indikator dan sub indikator di dalam aplikasi, bila kita kaitkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD maka setiap dinas akan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan indikator kemiskinan setiap individu miskin tersebut.

Selain agrerat masalah yang ditampilkan, data juga menampilkan by name by address. Sehingga dengan fitur ini akan mempercepat OPD dalam menentukan kelompok sasaran berdasarkan IKU OPD.

#	Indikator / Opsi	Data		
		PBDT 2019 Smt II	PBDT 2019 Smt I	PBDT 2018 Smt I
JENIS CACAT				
0	Tidak cacat	4	333,215	350,957
1	Tuna daksa/cacat tubuh	0	1,365	1,368
10	Cacat mental retardasi	0	1,074	2,050
11	Mantan penderita gangguan jiwa	0	644	732
12	Cacat fisik & mental	0	871	891
2	Tuna netra/buta	0	643	968
3	Tuna rungu	0	709	748
4	Tuna wicara	0	414	449
5	Tuna rungu & wicara	0	398	412
6	Tuna netra & cacat tubuh	0	130	130
7	Tuna netra, rungu, & wicara			
8	Tuna rungu, wicara & cacat tubuh			
9	Tuna rungu, wicara, netra & cacat tubuh			

Data Anggota Rumah Tangga Berbasis Indikator: JENIS CACAT = Mantan penderita gangguan jiwa

[Excel](#)
[CSV](#)
[PDF](#)
[Print](#)
[Column visibility](#)
[Cart](#)

#	ID BDT	ID ART BDT	Nama	Umur	Slc
PENYAKIT KRONIS/MEKANISME					
1	3312010000000046	33120100000002606	JHEM	70	27
2	3312010000000025	33120100000002290	TUMAYEM	67	33
3	33120100000000606	33120100000000001	POMEJEM	79	25
4	33120100000000153	331201000000003001	MESAW	53	66
5	33120100000000375	3312010000000037501	SUTALOK	31	30
6	33120100000000798	3312010000000079801	MESUREM	43	38
7	33120100000000080	3312010000000008001	MESUREM	47	30
8	33120100000000082	3312010000000008201	TUMPON	78	31
9	33120100000000001	3312010000000000101	KARNI	47	18
10	33120100000000001	3312010000000000101	ANS. TRHARYAM	25	72

e. Query Data RTS

Fitur ini untuk memudahkan setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam menganalisa data Rumah tangga sasaran (RTS), menggabungkan lebih dari satu indikator untuk meelacak warga miskin yang memenuhi syarat menerima layanan jaminan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Misalnya : Yang berhak mendapatkan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kriteria 1) Tanah milik sendiri, 2) Dinding anyaman bambu, 3) Lantai tanah. Data yang akan muncul, kalau ke 3 syarat yang ditetapkan terpenuhi dari keluarga miskin tersebut.

The interface consists of several filter panels:

- Status Tempat Tinggal Rumah Tangga:**
 - Status Tempat Tinggal/Acara/ Senggo:**
 - Tidak Terlata
 - Milik Sendiri
 - Kotrak/sewa
 - Bebas sewa
 - Dinas
 - Lainnya
 - Status Lahan Tempat Tinggal:**
 - Milik sendiri
 - Milik orang lain
 - Tanah negara
 - Lainnya
- Jenis Lantai Terluas:**
 - Jenis Lantai Terluas:**
 - Marmer/granit
 - Lainnya
 - Karanda
 - Paderet/wiru/permodani
 - Ubin/tegel/teraso
 - Kayu/japan kualitas tinggi
 - Semen bata merah
 - Bambu
 - Kayu/japan kualitas rendah
 - Tanah
 - Jenis Dinding Terluas:**
 - Tembok
 - Plesteran anyaman bambu/kawat
 - Kayu
 - Anyaman bambu
 - Batang kayu
 - Bantol
 - Lainnya

Data Berbasis Indikator

Indikator Terpilih:

- 1. KEMERUDAHAN/PTTINCAL
- 2. JENIS LANTAI TERLUAS
- 3. JENIS DINDING TERLUAS

Terdapat ditemukan Data sebanyak 4655 Rumah Tangga Sasaran

No	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS
1	JAWA TENGAH	INDONESIA	PALANGKAHATI	SUMBERMULUNG	INDU RT 01 04 01	00000000000000000000	00000000	
2	JAWA TENGAH	INDONESIA	PALANGKAHATI	SUMBERMULUNG	INDU RT 01 04 02	00000000000000000000	00000000	
3	JAWA TENGAH	INDONESIA	PALANGKAHATI	SUMBERMULUNG	INDU RT 01 04 03	00000000000000000000	00000000	
4	JAWA TENGAH	INDONESIA	PALANGKAHATI	SUMBERMULUNG	BALOK PADEM LER RT 01 04 04	00000000000000000000	00000000	
5	JAWA TENGAH	INDONESIA	PALANGKAHATI	SUMBERMULUNG	DALU RT 01 04 05	00000000000000000000	00000000	
6	JAWA TENGAH	INDONESIA	PALANGKAHATI	SUMBERMULUNG	STUYUN PASLU RT 01 04 06 01	00000000000000000000	00000000	
7	JAWA TENGAH	INDONESIA	PALANGKAHATI	SUMBERMULUNG	PANEM PANGU RT 01 04 06 02	00000000000000000000	00000000	
8	JAWA TENGAH	INDONESIA	PALANGKAHATI	PETIRAN	BALADI RT 01 04 07 01	00000000000000000000	00000000	
9	JAWA TENGAH	INDONESIA	PALANGKAHATI	PETIRAN	BALADI RT 01 04 08 01	00000000000000000000	00000000	
10	JAWA TENGAH	INDONESIA	PALANGKAHATI	PETIRAN	BALADI RT 01 04 08 02	00000000000000000000	00000000	
11	JAWA TENGAH	INDONESIA	PALANGKAHATI	PETIRAN	BALADI RT 01 01 04 08	00000000000000000000	00000000	

f. Query Data Anggota Rumah Tangga (ART)

Fitur ini untuk memudahkan setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam menganalisa data dari setiap individu/anggota rumah tangga (art), menggabungkan lebih dari satu indikator untuk melacak warga miskin yang memenuhi syarat menerima layanan jaminan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Misalnya : OPD dinas Pendidikan membutuhkan data : Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, Umur 7-15 Tahun (Jenjang SD-SMP) Jenis Kelamin Laki-laki.

JENIS KELAMIN

JENIS KELAMIN

Laki-laki

Perempuan

UMUR SAAT PENDATAAN

UMUR SAAT PENDATAAN

Nilai Minimal (>=)

T

Nilai Maksimal (<=)

15

PARTISIPASI SEKOLAH

PARTISIPASI SEKOLAH

Tidak/belum pernah sekolah

Masih sekolah

Tidak bersekolah lagi

Formula Check Indikator

Data Berbasis Indikator

Indikator dipilih:

- 1. JENIS KELAMIN
 - Laki-laki
- 2. UMUR SAAT PENDATAAN
 - Nilai antara 7 dan 15
- 3. PARTISIPASI SEKOLAH
 - Tidak bersekolah lagi

Telah ditemukan sebanyak 595 baris data Penduduk (Anggota Rumah Tangga)

#	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Rincian	IDKOT	NIK	NIK	Umur
1	JAWA TENGAH	WONGORE	PRACAMAYONG	SIRIBENGLING	KLEPU RT 02 RW 05	01103000000111	ABEULLIYH MARUF	01103000000002	15
2	JAWA TENGAH	WONGORE	PRACAMAYONG	JOH	DUSUN DAMAN RT 00 RW 07	01103000000111	JAGI SUPHAI PUTRA	01103000000003	12
3	JAWA TENGAH	WONGORE	PRACAMAYONG	JOH	DUSUN GINDE RT 02 RW 11 JONGGONG KEMBUAN PALDI RT 02	01103000000111	WABU HARASPAH	01103000000003	11
4	JAWA TENGAH	WONGORE	PRACAMAYONG	GAMBIRANG	SAMAJAN RT 01 RW 14	01103000000044	ADITHYAN LAGHYA	01103000000003	15
5	JAWA TENGAH	WONGORE	PRACAMAYONG	GAMBIRANG	DUSUN BAWALAN RT 00 RW 14	01103000000111	USLANI SETIYANING	01103000000003	12
6	JAWA TENGAH	WONGORE	PRACAMAYONG	GAMBIRANG	DUSUN GALI RT 00 RW 08	01103000000111	CANDRA HARINAYATI	01103000000002	13
7	JAWA TENGAH	WONGORE	PRACAMAYONG	GAMBIRANG	DUSUN GALI RT 00 RW 08	01103000000111	UMAS ARDIYANTI	01103000000001	9
8	JAWA TENGAH	WONGORE	PRACAMAYONG	GAMBIRANG	DUSUN KUMAH RT 02 RW 07	01103000000008	HENDI PERMANA	01103000000001	7
9	JAWA TENGAH	WONGORE	PRACAMAYONG	GAMBIRANG	DUSUN MARBANG RT 00 RW 06	01103000000008	REHABELIYAH HARUNABNA	01103000000002	8
10	JAWA TENGAH	WONGORE	PRACAMAYONG	GAMBIRANG	DUSUN MELICIT 00 RW 01	01103000000011	OSMAN SUGRA HARALDI	01103000000001	10
11	JAWA TENGAH	WONGORE	PRACAMAYONG	GAMBIRANG	DUSUN PABEL RT 02 RW 02	01103000000008	JAGHI PALANGI	01103000000002	12

3. Sistem Informasi Desa (SID)

Aplikasi sistem Informasi Kesejahteraan (SIK) sedianya akan diintegrasikan dengan SID Pidekso yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), sehingga aplikasi SIK menjadi fitur tambahan di dalam SID. Saat ini belum terjadi proses integrasi antar aplikasi, dan untuk sementara waktu SIK di tingkat desa masih berdiri sendiri. Tetapi aplikasi di desa bisa berjalan dengan baik, dimana proses input data bisa dilakukan di setiap desa dan data desa bisa ditarik ke supra kabupaten.

REKOMENDASI
PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN (SIK)
SEBAGAI BASE LINE PERENCAAN SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN MANAJEMEN KERUYOKAN
UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Aplikasi akan memudahkan distribusi data dan menginformasikan tentang persoalan dan kebutuhan warga miskin baik pada Organisasi Perangkat daerah (OPD), Pemerintah Desa, dengan membangun hak akses masing-masing OPD maupun desa. Keterbukaan informasi juga memungkinkan data ini diakses oleh masyarakat umum, hanya pada batas jumlah data agregat tanpa bisa akses by name by address.
2. Karena ketersediaan data saat ini bersumber dari Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian sosial, maka data ini bisa menjadi sebagai basis rujukan awal perencanaan setiap OPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD dikaitkan dengan indikator kemiskinan. Meskipun diduga data DTKS masih belum valid dengan kondisi kesejahteraan di tingkat masyarakat, berdasarkan uji coba di 5 desa.
3. Aplikasi ini akan lebih sempurna, apabila dilengkapi dengan rumus kategorisasi kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bisa menyusun kategorisasi lokal, hal ini dikarenakan pemerintah nasional belum mau memberikan rumus kategorisasi yang selama ini digunakan. Rumus kategorisasi menjadi penting untuk melihat progres dari a) Setiap Intervensi yang dijalankan, akan merubah indicator dari kelompok miskin dan terjadi pergeseran tingkat kesejahteraan (Data Bisa Real Time), b) Sebagai acuan Dinas Sosial untuk mengetahui DTKS yang harusnya sudah keluar dari data kemiskinan, c) Sebagai acuan Dinas Sosial atas Data Lokal/usulan baru yang layak untuk diajukan sebagai Data DTKS ke Kemensos.
4. Proses pengakuan untuk usulan baru ke kementerian bisa memakan waktu yang lama, sehingga perlu digagas untuk calon warga miskin yang memenuhi syarat untuk menjadi data lokal kabupaten terlebih dahulu dan di intervensi dengan anggaran APBD Kabupaten.
5. Bisa ditambahkan dengan rumus bidang OPD, misalnya rumus kategorisasi kesejahteraan dari sisi rumah. Dengan rumus tertentu kita bisa menyusun data ini berdasarkan rangking dari tingkat keparahan rumah warga miskin.

6. Perlu ditambahkan fitur penerima layanan jaminan sosial baik dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten agar tidak terjadi dobel penerima layanan.
7. Dispermasdes Kabupaten bersama Diskominfo menambahkan fitur SIK ke Sistem Informasi Desa (SID) PIDEKSO.
8. Aplikasi ini bisa menjadi rujukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sukoharjo sebagai bahan untuk melakukan koordinasi, sinergitas dan pengendalian program di dalam rapat-rapat koordinasi.
9. TKPKD perlu melakukan uji coba percepatan Penanggulangan kemiskinan dengan pola manajemen keroyokan baik OPD, Desa maupun CSR Swasta pada beberapa desa. Dengan kekuatan aplikasi ini akan mudah untuk melakukan distribusi tanggung jawab dan mampu monitoring pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan. Diharapkan dengan pola kerja ini akan mampu meningkatkan kualitas rapat-rapat koordinasi yang dijalankan di TKPKD sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskin agar tepat sasaran dan tepat program.
10. Setiap OPD dan Desa perlu dilakukan pelatihan dalam penggunaan aplikasi khususnya dalam membaca data dan menganalisa data dan kemudian mampu dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan yang pro poor.
11. Setiap OPD perlu di identifikasi antara Indikator kinerja utama (IKU) dengan indikator kemiskinan yang tersedia yang akan menjadi tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Aplikasi masih mungkin ditambahkan indikator-indikator tambahan yang dibutuhkan setiap OPD.

Hasil 3 :

**Pengembangan Aplikasi Android untuk
verifikasi Indikator kemiskinan yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi
Kesejahteraan (SIK) dan Sistem Informasi
Desa (SID)**

C. Pengembangan Aplikasi Android untuk verifikasi Indikator kemiskinan

Proses pendataan warga miskin dengan berbagai indikator dan sub indikator baik untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Anggota Rumah Tangga (ART) yang jumlahnya cukup banyak, selama ini menggunakan blangko kertas dalam proses pencacahannya. Masih diperlukan input ulang atas hasil pencatatan indikator ke dalam aplikasi. Pola verifikasi indikator kemiskinan dengan berbasis kertas, akan memakan biaya yang cukup besar dan waktu yang lebih panjang.

Untuk mempermudah proses verifikasi, yayasan JALATERA menginisiasi pembuatan aplikasi berbasis android yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK) yang dibuat untuk proses verifikasi indikator kemiskinan. Selain menghemat biaya dan waktu, kekuatan aplikasi android ini juga bisa menampilkan foto setiap indikator dan titik koordinat dari rumah tangga sasaran (RTS). Adapun mekanisme kerja dan tampilan dari aplikasi android adalah sebagai berikut :

1. Pengunduhan Aplikasi Android

Aplikasi jersus (JALATERA Sensus) adalah aplikasi yang di kembangkan untuk melakukan pendataan warga miskin berbasis aplikasi android. Aplikasi jersus sendiri di kembangkan menyesuaikan formulir isian DTKS yang berbasis kertas yang di kembangkan agar dapat diinput dengan perangkat android, untuk mendapatkan aplikasi jersus bisa download di <https://s.id/JALATERA-13>

2. Tampilan login jersus



(gambar 1.1 halaman login jersus)

Halaman login ini muncul pertama kali ketika aplikasi selesai di instal, untuk mengakses dan bisa menggunakan aplikasi silakan masukkan user dan pasword yang telah di daftar lewat dashboard e-sik kabupaten

3. Halaman utama aplikasi jersus



(gambar 1.2 halaman utama aplikasi jersus)

Pada halaman utama jersus terdapat menu menu utama yaitu ;

a. Sinkronisasi

Pada menu ini digunakan untuk mengambil data dan mengirim data di server jersus agar memperbaharui data responden yang di server dan di perangkat android yaitu data responden RT ART dan indikator RT dan ART

b. Wilayah

Pada menu ini berisi tentang daftar data responden yang bisa di pilih sesuai dengan wilayah yang mempermudah dalam pencarian data responden

c. **Menu utama** (pojok kanan atas)



(gambar 1.2.c daftar menu utama)

Pada menu ini memiliki sub menu yaitu :

- **Home** : halaman utama aplikasi jersus
- **Profil** : informasi pengguna aplikasi jersus atau user login aplikasi jersus
- **Responden** : daftar responden (sama seperti menu wilayah)

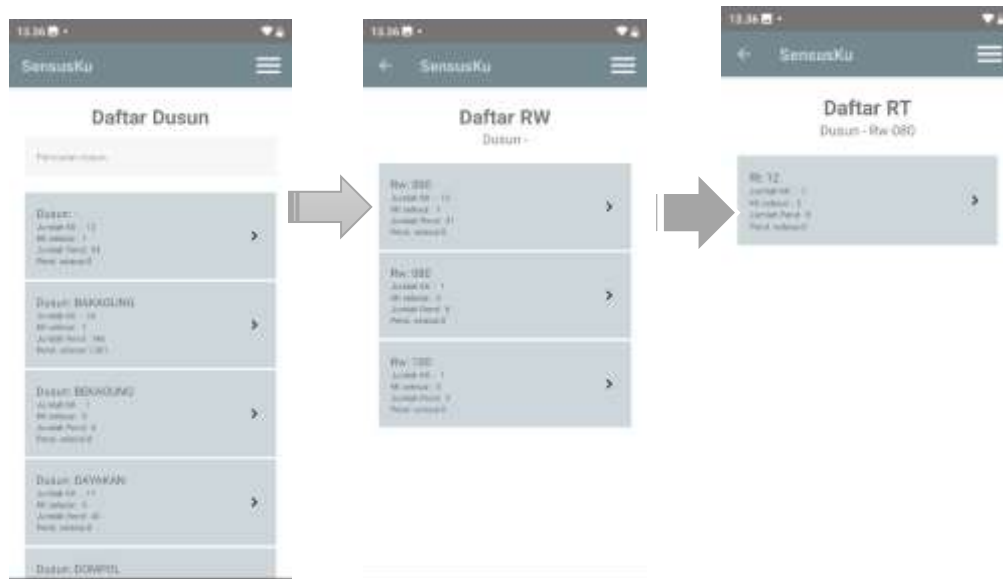
4. **Halaman sinkronisasi**



(gambar 1.3 halaman sinkronisasi)

Pada halaman proses sinkronisasi data dari perangkat keserver dan mengupdate data yang baru.

5. Halaman menu wilayah



(gambar 4.1 halaman menu wilayah dusun rw rt)

Pada halaman ini berisis data respondeng yang yang di pisah berdasarkan wilayah dusun Rukun warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

6. Masuk pada menu responding

Pada halaman responding berisi :

a. Daftar Kepala Rumah Tangga =



b. Daftar Anggota Rumah Tangga =



Tampilan menu responding akan menampilkan setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sudah terdaftar di sistem informasi Kesejahteraan, dan dibawahnya adalah responden dari anggota Rumah Tangga (ART) dari Kepala Keluarga secara berurutan.



(gambar 1.5 daftar kk dan art responding)

Untuk mengisi data responding pilih kk untuk mengisi form responden kepala rumah tangga dan pilih nama anggota rumah tangga untuk mengisi form responden anggota rumah tangga

7. Form responden kepala keluarga (kk)

Pada form ini berisi kuisisioner yang formatnya sama dengan form kuisisioner DTKS

8. Form responden anggota rumah tangga (art)

Pada form ini berisi kuisisioner yang formatnya sama dengan form kuisisioner DTKS

REKOMENDASI

PENGUNAAN APLIKASI ANDROID UNTUK VERIFIKASI INDIKATOR KEMISKINAN YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN (SIK)

- a. Aplikasi android untuk verifikasi data kemiskinan layak untuk dikembangkan karena akan terjadi penghematan biaya dan waktu dalam implementasinya.
- b. Aplikasi ini juga bisa bekerja dalam kondisi tanpa ada jaringan internet (Blanch spot) dengan bekerja secara off line, dan ketika ada internet data-data akan dipindah ke Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK)
- c. Aplikasi ini juga dilengkapi foto untuk setiap indikator, sehingga bisa mengurangi kecurangan data yang dilakukan di lapangan. Untuk foto perlu dibangun kesepakatan di tingkat Kabupaten, indikator apa saja yang harus difoto dan tampil di dalam SIK. Semakin banyak foto yang dibutuhkan, maka dibutuhkan server yang besar juga di tingkat SIK kabupaten.
- d. Aplikasi ini dilengkapi dengan titik koordinat dari rumah tangga sasaran (RTS), sehingga akan mudah melacak keberadaan rumah warga miskin.
- e. Untuk integrasi dengan Sistem Admisitrasi Kependudukan (SIK), aplikasi ini di desain untuk tidak terjadi sinkronisasi. Tetapi sinkronisasi akan dijalankan oleh aplikasi SIK.
- f. Aplikasi android masih perlu diuji untuk efektifitasnya, hal ini dikarenakan proses kegiatan home visit kemarin belum dilakukan karena pandemi covid 19.

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN :

1. Panduan untuk perubahan indikator kemiskinan dan memasukkan daftar usulan baru warga miskin ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan di : [https:// sijawara.sukoharjokab.go.id/](https://sijawara.sukoharjokab.go.id/)
2. Satu buah Flasdik yang berisi Script aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan, yang berisi : ***(Tidak diandalkan khusus untuk diskominfo)***
 - Script aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan
 - Script aplikasi android untuk verifikasi warga miskin
3. Serah Terima Kegiatan Kerjasama dari Yayasan JALATERA dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.